



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN**

**UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUDARSONO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH**
3. NHK : **430900**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.106.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 309.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 210.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.261.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/162 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.972.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 214.000.000
6. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 360.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA GEAR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000



4. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.  
155.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
17.000.000
6. MOTOR, HONDA CRF Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
19.000.000
7. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.  
26.000.000
8. MOTOR, SM SPORT V16 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
19.000.000

|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA         | Rp. | 14.800.000    |
| D. SURAT BERHARGA                 | Rp. | ----          |
| E. KAS DAN SETARA KAS             | Rp. | 256.157.000   |
| F. HARTA LAINNYA                  | Rp. | ----          |
| Sub Total                         | Rp. | 4.738.257.000 |
| III. HUTANG                       | Rp. | 488.000.000   |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 4.250.257.000 |

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN

**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FENDY PURWANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 116361

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.178.550.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 578.550.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 89.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 72.581.883

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.340.131.883

**III. HUTANG** Rp. 219.602.752

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.120.529.131

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DESAK PUTU JENY  
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  
3. NHK : 142888

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.327.000.000**

1. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI  
Rp. 232.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA  
DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000  
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI  
Rp. 245.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **392.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL  
SENDIRI Rp. 5.500.000  
2. MOBIL, WULING MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
90.000.000  
3. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
90.000.000  
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.  
27.000.000  
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.  
180.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **----**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **52.930.000**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **165.730.800**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. 150.755.000

Rp. 2.088.915.800

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.088.915.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NYOMAN HERYAWAN TRIANA PUTRA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 142908

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.180.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI  
Rp. 180.000.000
2. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL  
SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA  
DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **52.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
15.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
15.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.  
22.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **----**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **35.349.990**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----**

**Sub Total** **Rp.** **2.267.349.990**

**III. HUTANG** **Rp.** **999.500.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **1.267.849.990**

Catatan:





1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN

**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ENY SUSANTI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 116540

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 369 m2/274 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/60 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 596.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INOVA REBORN G/DIESEL Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 478.800.000**



|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| D. SURAT BERHARGA                 | Rp. | 1.000.000.000 |
| E. KAS DAN SETARA KAS             | Rp. | 32.500.000    |
| F. HARTA LAINNYA                  | Rp. | ---           |
| Sub Total                         | Rp. | 7.907.300.000 |
| III. HUTANG                       | Rp. | 4.500.000     |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 7.902.800.000 |

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN

**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LUCILLUS WENANG CAILENDRA HIDAJAT
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK : 469021

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.125.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.125.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 251.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 110 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 3.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.500.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.392.000.000

**III. HUTANG** Rp. 3.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.389.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN

**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD FAUZI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
3. NHK : 766326

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.037.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 448.020.000
2. Tanah Seluas 206 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/46 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 534.630.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 170.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL SPORTY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 36.766.400

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 37.595.036

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.282.011.436

**III. HUTANG** Rp. 501.361.678

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 780.649.758

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PETRUS TEGUH SUBAGYO  
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA  
3. NHK : 144113

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/54 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **312.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000  
2. MOTOR, VESPA SPRINT I GET 150 ABS A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000  
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000  
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **80.500.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **9.863.000**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **15.350.000**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **4.300.000**

**Sub Total** **Rp.** **3.122.013.000**

**III. HUTANG** **Rp.** **2.020.628.726**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **1.101.384.274**





1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.